

BUNG KARNO, BUNG HATTA, DAN PAK HARTO

Oleh Nurcholish Madjid

Guna sedikit menyegarkan kesadaran kita tentang masalah pembangunan bangsa ini, kita mungkin perlu meruntut secara singkat proses pembangunan bangsa kita.

Asal mulanya ialah para pendiri negeri Indonesia memproyeksikan berdirinya sebuah negara kebangsaan modern (*modern nation state*) yang adil, terbuka dan demokratis. Bibit konsep kebangsaan modern Indonesia itu pada dasawarsa pertama abad ini diletakkan antara lain oleh gerakan Budi Utomo, dan kemudian dikembangkan dengan subur dan ditebar ke seluruh wilayah “Hindia Belanda” oleh Sarekat Islam.

Prasarana kultural guna menopang wawasan negara kebangsaan modern itu kemudian diletakkan dengan baik oleh Kongres Pemuda 1928. Kongres itu telah memilih bahasa Melayu sebagai bibit dan titik-tolak pengembangan bahasa nasional: suatu bahasa dengan ciri utama budaya pantai (pesisir) yang egaliter, terbuka, dinamis, dan kosmopolit, didukung oleh etos perekonomian wiraswasta perdagangan dalam semangat kebebasan dan kemandirian dengan sebaran pengguna bahasa itu yang meliputi seluruh “universum” Nusantara.

Dimulai dari semuanya itu, kini Indonesia tumbuh dan tampil sebagai bangsa baru yang paling sukses dalam membangun dan mengembangkan bahasa kebangsaan, praktis lebih berhasil daripada bangsa baru mana pun juga di dunia. Dengan tingginya kemantapan

diri warga negara Indonesia terhadap bahasa nasionalnya, dan dengan penyebaran bahasa itu sehingga meliputi seluruh wilayah tanpa kecuali, bangsa Indonesia tumbuh menjadi “*corporate nation*” dengan langgam kejiwaan atau *mind set* yang semakin menyatu dan terpadu. Jelas sekali keunggulan ini merupakan modal amat besar untuk pembangunan bangsa selanjutnya.

Kita akan lihat peran Bung Karno dan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta (pernah dikenal sebagai “Dwi Tunggal”) adalah dua tokoh paling penting dalam masa-masa pembentukan (*formatif ages*) bangsa Indonesia. Dalam peranan mereka sebagai proklamator kemerdekaan, kedua tokoh itu dapat dipandang sebagai sosok kepribadian sekaligus harapan Indonesia.

Selain dikenal sebagai pemimpin penggalang solidaritas (*solidarity maker*), Bung Karno adalah tokoh yang secara nyata menghadapi dan merasakan tantangan dalam mewujudkan wawasan negara kebangsaan modern. Usahanya terbentur pada kenyataan tidak adanya prasarana sosial budaya yang memadai untuk menopang perwujudan wawasan itu. Sebab pada masanya, keindonesiaan masih banyak berupa konsep dan imaginasi kreatif antara para pelaku berbagai budaya daerah dalam wadah peleburan (“*melting pot*”) ibukota Jakarta Raya, yang sangat berpengaruh dalam pembentukan format budaya nasional untuk mendukung pelaksanaan sebuah negara kebangsaan modern yang *univertiun*-nya meliputi Sabang-Merauke. Setelah selama dua dasawarsa melewati proses-proses coba dan salah yang amat gaduh, bahkan kacau balau, Bung Karno dan sistem kekuasaannya (“Orde Lama”) tersungkur ke malapetaka sosial-politik 1965.

Tidak seperti Bung Karno, Bung Hatta adalah jenis “kerja tekun” bukan tokoh “kerja berkobar”, karena itu dikenal sebagai tipe pemimpin “pemecah masalah” (*problem solver*). Tanpa unsur penampilan flamboyan seperti Bung Karno, ketokohan Bung Hatta ditandai oleh kesederhanaan, kesalehan dan ketulusan seorang pribadi hasil didikan seorang ayah yang tokoh sufi di daerahnya.

Dari latar belakang kerumahtanggaan ayah-bundanya itu ditambah dengan pendidikan modernnya yang tuntas serta penghayatan dan pengalaman nyata tentang ide-ide terbaik negara kebangsaan modern seperti keadilan, keterbukaan dan demokrasi selama ia belajar dan hidup di Negeri Belanda, maka tepat sekali jika Bung Hatta dipandang dengan penuh hormat sebagai hati nurani bangsa. Dalam kepribadian dan alam pikiran Bung Hatta itulah tercermin cita-cita paling murni tentang negara kebangsaan modern Republik Indonesia.

Akan tetapi sama dengan nasib para tokoh masa-masa formatif, Bung Hatta juga tidak sepenuhnya berhasil merealisasikan ide-ide-nya. Bersama dengan tokoh-tokoh Masyumi, PSI, Parkindo, dan Partai Katolik serta unsur-unsur dari PNI, NU dan lain-lainnya yang membentuk “Liga Demokrasi” Bung Hatta berusaha membendung kecenderungan otoriter Bung Karno dan rezimnya, namun gagal.

Sekalipun ia tidak menunjukkan sikap kepahitan pribadi kepada Bung Karno, namun Bung Hatta menjadi lambang kritik fundamental kepada konsep Bung Karno tentang “Demokrasi Terpimpin”. Bung Karno tidak peduli kepada Bung Hatta, dan ia membubarkan Liga Demokrasi, menyatakan Masyumi dan PSI sebagai partai terlarang (dengan stigma “ekstrem kanan” yang terkutuk), dan partai-partai serta perorangan-perorangan yang terlibat mengalami pembatasan dan penyempitan ruang gerak yang sangat ketat.

Dari yang terlihat dalam perjalanan politik bangsa selanjutnya, banyak indikasi betapa orang tidak menyadari dan cenderung meremehkan kepekatan perasaan “kepahitan kolektif” akibat tindakan Bung Karno itu, dan kemudian dikejutkan oleh ledakan sosial politik yang diakibatkannya.

Pak Harto sebagai pelanjut Bung Karno tampak seperti menyadari kekeliruannya sendiri, ketika sejak pertengahan 1980-an mulai menunjukkan “minat”-nya kepada Islam, lebih-lebih setelah pada 1990 menjalankan ibadah haji. Lepas dari nilai pribadi Pak Harto

yang menjadi rahasianya sendiri dan rahasia Tuhan, isyarat-isyarat kesalehan formal-simbolik Pak Harto itu telah menimbulkan harapan pada sebagian kaum Islam, khususnya mereka dengan wawasan budaya pantai (yang secara salah kaprah disebut kaum “modernis”). Tetapi harapan itu cepat sekali memudar dan sirna, karena tingkah laku Pak Harto tidak seperti yang diharapkan. Maka terjadilah gerakan reformasi sekarang ini, dengan segala persoalannya.

Dari uraian singkat di atas, jelas sekali bahwa kita tidak mempunyai pilihan selain kembali memahami wawasan para pendiri negara tentang kebangsaan modern, kemudian berusaha dengan sungguh-sungguh mewujudkannya dalam kenyataan masa depan bangsa dan negara. Berkenaan dengan ini, segi pokok memahami dan melaksanakan hak-hak asasi manusia adalah suatu kemestian yang tidak dapat ditawar-tawar. Alternatifnya ialah otoritarianisme dan totalitarianisme.

Di tengah berbagai gejolak sekitar perdebatan dan perbedaan pandangan tentang esensi pokok hak asasi itu, beberapa hal sudah jelas, yaitu suatu pengertian tentang hak asasi manusia diperlukan sebagai ukuran minimum untuk menjamin harkat dan martabat pribadi tanpa memandang perbedaan kulturalnya. Beberapa hal paling pokok dapat kita sebutkan di sini, yaitu, kebebasan nurani (*freedom of conscience*) yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat; kebebasan dari rasa takut dan dari ancaman penyiksaan (*torture*), dan suatu bentuk jaminan untuk memperoleh perlakuan hukum yang adil dan tidak memihak. [❖]